

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal. "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum.(2004)
- Asshiddiqie, Jimly. "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, cet." Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. teori Hans Kelsen tentang hukum. (Konstitusi Press, 2006)
- Jimly, Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (2006).
- Redi, Ahmad. Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. (2018).
- Satjipto, R. Ilmu Hukum. Cetakan kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,2014)
- Soemantri, Sri. "Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan." (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2014).
- Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum.(Universitas Indonesia, Jakarta 1986)
- Suteki & Taufani, G. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik). (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)
- Triwulan, T. T . Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Waluyo, Bambang. Penelitian hukum dalam praktek. (Sinar Grafika, 1991)

JURNAL

- Aibon, Pasaribu. "Optimalisasi kewenangan dalam pengujian konstitusionalitas undang – undang" Bunga Rampai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi (2019).
- Fajarwati, Meirina. "Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Hukum & Pembangunan 48.1 (2018).

Muhtadi, Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 5.3 (2014).

Pakpahan, Zainal Abidin. "EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SUATU TINJAUAN YURIDIS KONSTITUSIONAL." Jurnal Ilmiah Advokasi 4.2 (2016): 81-107.

Rohmat, Ah Mujib. "Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi." Jurnal Pembaharuan Hukum 3.2 (2016): 181-190.

Samekto, FX Adji. "Menelusuri akar pemikiran hans kelsen tentang stufenbeuthetheorie dalam pendekatan normatif-filosofis." Jurnal Hukum Progresif 7.1 (2019)

Widayati, Widayati, Absori Absori, and Aidul Fitriciada Azhari. "Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan Mpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Media Hukum 21.2 (2014)

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pemerintah Indonesia. 1945. Undang – Undang Dasar 1945

Pemerintah Indonesia. 1999 – 2002 . Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pemerintah Indonesia. 1966. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 20 Tahun 1966 tentang memorandum DPR – GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia. 2000. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang – Undangan

Pemerintah Indonesia. 2003. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2003 TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemerintah Indonesia. 2011. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

WAWANCARA

Umbu Rauta,Wawancara, Dosen Fakultas Hukum UKSW Salatiga, (Semarang: 12 Januari 2021).